

# RANKHIR

**(RENCANA STRATEGIS)**

**TAHUN 2025 - 2029**



**KECAMATAN TAKERAN**

**KABUPATEN MAGETAN**

## **KATA PENGANTAR**

Rencana Strategis Kecamatan Takeran Tahun 2025-2029 disusun untuk memberikan kepastian arah kebijakan, strategi, tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang terukur dalam melaksanakan program dan kegiatan. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan Tahun 2025–2029 merupakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah perangkat daerah yang mencakup periode lima tahun. Renstra ini disusun sebagai bentuk operasionalisasi visi, misi, serta tujuan pembangunan daerah, yang berisi program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan, dengan tetap berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2025–2029, dan bersifat indikatif.

Penyusunan Renstra Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan tahun 2025– 2029 ini mengacu pada visi, misi dan program Bupati Magetan yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam suatu periode masa jabatan.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini dan sernoga Allah SWT. Senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan Pembangunan di Kabupaten Magetan.

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	4
1.4 Sistematika Penulisan .....	4
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b> .....	<b>8</b>
2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Takeran.....	9
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	31
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b> .....	<b>34</b>
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2025-2029.....	36
3.2 Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 .....	37
3.3 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.....	38
<b>BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b> .....	<b>39</b>
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>80</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dokumen Rencana Strategis Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan Tahun 2025—2029 disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2025—2029.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2029 secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pada pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra, proses tersebut telah menghasilkan Renstra Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan yang memuat visi, misi, tujuan sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2029.

Dengan memperhatikan berbagai perkembangan yang mempengaruhi kehidupan dan struktur organisasi perangkat daerah, yakni berbagai peraturan perundangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka dibuatlah Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Takeran Tahun 2025—2029. Dokumen Renstra ini merupakan rencana pembangunan jangka menengah Kecamatan Takeran yang dalam pelaksanaannya akan dijabarkan dan menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Takeran yang akan disusun setiap tahun sebagai Rencana Pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kinerja Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban. Renstra ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat yang diemban

Kecamatan Takeran sebagaimana ketentuan dan sekaligus langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah sebagaimana ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Karena mengacu pada RPJMD Kabupaten Magetan, maka secara otomatis Renstra Kecamatan Takeran juga mengacu pada dokumen perencanaan di atasnya yaitu RPJPD Kabupaten Magetan, RPJMD Provinsi Jawa Timur, serta RPJM Nasional.

## **1.2 Dasar Hukum Penyusunan**

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan Tahun 2025 2029 berdasarkan dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021.
13. Instruksi Menetri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengan Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2045;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045;
15. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Jawa Timur 2025-2029;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2024 tentang RPJPD Kabupaten Magetan Tahun 2025-2045.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan.

18. Peraturan Bupati Magetan Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Magetan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2025–2029.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Renstra Kecamatan Takeran Tahun 2025—2029 dimaksudkan agar Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, regional, nasional dan global sehingga di samping tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga mampu eksis dan berkembang dalam rangka meningkatkan kinerja profesionalnya.

Adapun tujuan disusun Renstra Kecamatan Takeran Tahun 2025—2029 adalah untuk:

1. Menjabarkan arahan RPJMD Kabupaten Takeran Tahun 2025—2029 ke dalam rencana instansional;
2. Menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah 2025—2029 ke dalam tujuan, sasaran dan program kerja operasional serta kegiatan indikatif Perangkat Daerah;
3. Menyediakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagai acuan penyusunan rencana kerja atau rencana kinerja tahunan;
4. Menentukan strategi untuk pengelolaan keberhasilan, penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan, adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, peningkatan komunikasi vertikal dan horizontal, peningkatan produktivitas dan menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Strategis Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan Tahun 2025—2029 adalah sebagai berikut:

<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>		
1.1	Latar Belakang	Merumuskan latar belakang penyusunan Renstra PD berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra PD dan dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra PD.
1.2	Dasar Hukum Penyusunan	Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra PD, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.
1.3	Maksud dan Tujuan	Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renstra PD.
1.4	Sistematika Penulisan	Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renstra PD.
<b>BAB II: GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGI PERANGKAT DAERAH</b>		
2.1	Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 2.1.4 Kelompok sasaran Pelayanan Perangkat Daerah 2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan 2.1.6 Dukungan BUMD dalam	Memuat Tugas , fungsi dan Struktur Perangkat Daerah; Sumber Daya Perangkat Daerah; Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah; dan Kelompok sasaran layanan

	pencapaian kinerja perangkat daerah 2.1.7 Kerjasama Daerah yang menjadi tanggungjawab perangkat daerah	
2.2	Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 2.2.1 Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah 2.2.2 Isu-isu strategis perangkat daerah	Memuat Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat daerah dan Isu Strategis
<b>BAB III: TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN</b>		
3.1	Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah	Tujuan dan sasaran didasarkan pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.
3.2	Strategi Perangkat Daerah	Memuat tentang Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029
3.3	Arah kebijakan Perangkat Daerah	Rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Restra PD.

**BAB IV: PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

4.1	Uraian Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Memuat Daftar program, kegiatan, dan subkegiatan dalam mencapai kinerja Perangkat Daerah dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030 sehingga perlu pernyataan eksplisit bahwa program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah yaitu pijakan penyusunan Renja PD Tahun 2030.
-----	--	--

**BAB V: PENUTUP**

5.1.	PENUTUP	Menyajikan kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan Pemerintahan Daerah.
------	---------	---

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Dalam kedudukan dan fungsinya kecamatan memiliki posisi yang sangat penting karena keberhasilan tugas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta mengembangkan potensi wilayah sangat ditunjang oleh keberadaan pemerintah kecamatan, untuk itu tantangan yang harus dijawab adalah bagaimana mewujudkan pemerintahan kecamatan yang berwibawa dan mampu memberikan pelayanan serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang.

Memenuhi maksud tersebut, kiranya upaya untuk memperkuat Pemerintah Kecamatan maka dikeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 82 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Kecamatan. Dengan didasarkan pada ketentuan pasal 2 yang berbunyi Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat, Camat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Melalui urusan tersebut, Pemerintah Kecamatan Takeran berupaya meningkatkan kemampuan pelayanan yang profesional, efektif, efisien, akuntabel dan transparan, dengan meningkatkan perbaikan proses mekanisme perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan evaluasi serta mengharapkan kiranya Pemerintah Kabupaten segera Menyusun berbagai kebijakan, yang menunjang pada kelancaran pelaksanaan tugas pelimpahan sebagian urusan yang diberikan Bupati kepada Camat dan Lurah agar mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat.

## **2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Takeran**

### **2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Kecamatan Takeran**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada Daerah Kota/Kabupaten untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 224 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa keberadaan Kecamatan adalah:

1. Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
2. Bupati/Wali Kota wajib mengangkat Camat dari pegawai negeri sipil yang menguasai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pengangkatan Camat yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatalkan keputusan pengangkatannya oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

#### **1) FUNGSI**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 82 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Kabupaten Magetan. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok, kecamatan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program dan kegiatan Kecamatan;
2. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan bidang ekonomi, sosial dan pembangunan;
3. Penyelenggaraan pelayanan publik yang menjadi kewenangannya;
4. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan / atau kelurahan;
5. Pembinaan kepegawaian Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan;
6. Pelaksanaan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan terhadap kewenangan yang menjadi tanggung jawab Kecamatan;

7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2) TUGAS

Tugas dari masing-masing jabatan yakni:

1. Camat

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan kemasyarakatan dalam wilayah kerja Kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Camat mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah ditingkat Kecamatan
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan / atau kelurahan;
- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- j. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

## 2. Sekretaris Kecamatan

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, membina, dan mengevaluasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan.

Untuk menyelenggarakan tugas kesekretariatan Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas :

- a. Pengelolaan urusan surat-menyurat, kearsipan keprotokolan, rumah tangga, ketertiban, keamanan, penyelenggaraan rapat dan perjalanan dinas;
- b. Penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- c. Pengelolaan barang Inventaris dan perlengkapan;
- d. Pengelolaan urusanKepegawaian;
- e. Pengelolaan urusan keuangan;
- f. Pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan pada kecamatan dan kelurahan;
- g. Pengelolaan urusan kesejahteraan pegawai;
- h. Pelaksanaan fasilitas penyusunan program dan kegiatan pada kecamatan dan kelurahan;
- i. Pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik;dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

## 3. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

Melaksanakan tugas di bidang administrasi umum dan kepegawaian juga melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas antara lain :

- a. Melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi kecamatan;
- b. Membuat perencanaan pengadaan barang dan jasa;
- c. Menyiapkan penyelenggaraan rapat dan keprotokolan;
- d. Melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan keamanan kantor;
- e. Mengurus dan mencatat barang inventaris dan perlengkapan kantor;
- f. Melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi pengumpulan data kepegawaian, cuti, kenaikan pangkat, pensiun;

- g. Menyiapkan bahan dalam rangka upaya peningkatan disiplin pegawai;
  - h. Mengurus kesejahteraan pegawai;
  - i. Merencanakan pengelolaan arsip;
  - j. Melaksanakan tugas pelayanan administrasi publik; dan
  - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.
4. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan Evaluasi Dan Pelaporan Melaksanakan tugas dibidang pengelolaan keuangan, serta harta kekayaan asset kecamatan dan kelurahan, juga melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sub. Bagian Keuangan dan aset mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan dan mengolah bahan untuk Menyusun rencana Kegiatan Anggaran;
- b. Menyiapkan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
- c. Melaksanakan tata usaha keuangan;
- d. Memverifikasi dokumen pertanggungjawaban keuangan;
- e. Melaksanakan urusan tata usaha perjalanan dinas;
- f. Melaksanakan tata usaha gaji pegawai;
- g. Menghimpun Peraturan mengenai andimintrasi keuangan dan pelaksanaan anggaran;
- h. Menyusun laporan keuangan;
- i. Melaksanakan evaluasi dan mentoring aggaran;
- j. Mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan program kegiatan;
- k. Menyiapkan data penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA);
- l. Menganalisa data, menyusun program kegiatan dan Rencana Kerja (RENJA);
- m. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program kegiatan;
- n. Menginventarisir data hasil kegiatan untuk bahan Menyusun laporan hasil kegiatan;
- o. Menghimpun data dan menyusun laporan monitoring, evaluasi hasil rencana kerja, realisasi fisik dan anggaran, Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD), Laporan

- Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati;
- p. Mengelola dokumentasi perjanjian kinerja;
  - q. Mengkoordinasikan, menghimpun pelaksanaan penyusunan Stándar Pelayanan (SP), Stándar Operasional Prosedur (SOP), dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
  - r. Menyiapkan data untuk Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP); dan
  - s. Melaksanakan tugas-tugas dinas lain ynag diberikan oleh Sekretaris.

5. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melakukan urusan pemerintahan umum dan pemerintahan desa/kelurahan dan administrasi kependudukan serta melaksanakan kegiatan inventarisasi kekayaan Desa.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. Menyusun program kerja dan anggaran Seksi Pemerintahan;
- b. Menyusun program dan melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan Desa atau Kelurahan;
- c. Melaksanakan fasilitas rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- d. Melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- f. Menyusun program dan pembinaan di bidang pertanahan / keagrariaan;
- g. Mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum (Pemilu)
- h. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan perangkat / lembaga wilayah Desa/Kelurahan;
- i. Melaksanakan Fasilitasi kegiatan di bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

- j. Menyusun Evaluasi dan melaporkan program kerja seksi pemerintahan ; dan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Seksi pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai tugas melakukan pembinaan pemberdayaan masyarakat di bidang perekonomian, pembangunan, lingkungan hidup dan pemberdayaan perempuan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan mempunyai tugas :

- a. Menyusun program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b. Memfasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan ;
- c. Melaksanakan fasilitas sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan desa (RPJMD Kab/kota-RPJMDes;
- d. Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- e. Memfasilitasi penyusunan perencanaan Pembangunan partisipatif;
- f. Fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- g. Memfasilitasi kegiatan PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga)
- h. Melaksanakan koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;
- i. Memfasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;
- j. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan Kawasan perdesaan di wilayahnya;
- k. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan pemberdayaan masyarakat dan desa dibidang pemberdayaan, pembangunan, lingkungan hidup dan pemberdayaan perempuan;
- l. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan di bidang perbankan, koperasi dan perkreditan rakyat;

- m. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan di bidang usaha peternakan, perkebunan, perikanan dan pertanian;
- n. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan di bidang administrasi pengelolaan keuangan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Desa/Kelurahan;
- o. Menyusun evaluasi dan pelaporan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- p. Memfasilitasi pelaksanaan Musrenbang di Desa/Kelurahan;
- q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

#### 7. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah, pembinaan politik dalam negeri serta pembinaan Perlindungan Masyarakat (LINMAS).

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan program kerja dan anggaran seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- b. Melaksanakan dan pembinaan ketertiban wilayah;
- c. Melaksanakan program dan pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas);
- d. Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta mempertahankan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. Mengkoordinasikan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Melaksanakan pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;

- g. Melaksanakan kegiatan pencegahan dalam menghadapi bencana alam dan bencana lainnya;
- h. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- i. Melaksanakan evaluasi dan melaporkan program kerja seksi ketentraman dan ketertiban; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

#### 8. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melakukan pembinaan bidang Sosial Kemasyarakatan serta kegiatan pengembangan sarana dan prasarana keagamaan, pendidikan, pariwisata, budaya, pemuda dan olahraga.

Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Kesejahteraan Sosial;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan dalam rangka meningkatkan kegiatan dan peran serta Lembaga sosial kemasyarakatan dan pelayanan sosial;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan di bidang kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan kegiatan pengembangan sarana dan prasarana keagamaan;
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan peringatan hari besar nasional dan agama;
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan lembaga sosial kemasyarakatan dan pembinaan di bidang pendidikan, kebudayaan dan pariwisata;
- h. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan wadah organisasi kepemudaan;
- i. Mengkoordinasikan pelaksanaan dan pembinaan di bidang olah raga dan wadah organisasi olah raga;
- j. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan kegiatan dalam rangka pengusulan dan pendistribusian

bantuan sosial kepada korban bencana alam dan bencana lainnya;

- k. Melaksanakan penyusunan evaluasi dan pelaporan program kerja Seksi Kesejahteraan Sosial; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

9. Kelompok Jabatan Fungsional

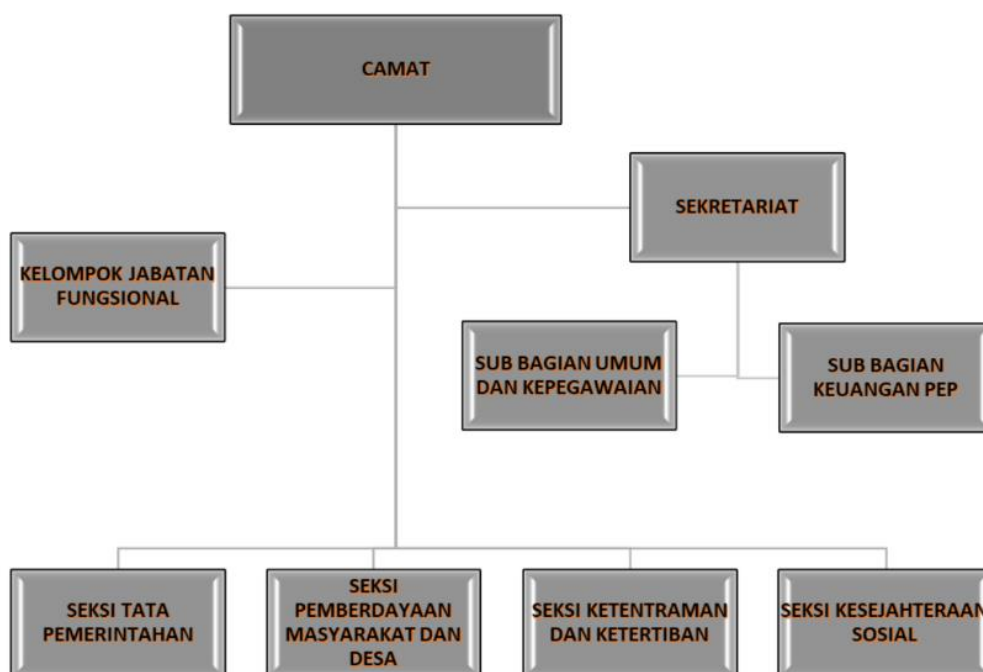
Kelompok Jabatan fungsional melaksanakan tugas dan kegiatan sesuai dengan keahlian.

3) STRUKTUR

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan, susunan organisasi Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat ;
- b. Sekretariat ;
- c. Seksi Tata Pemerintahan ;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ;
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum ;
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial ; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Struktur Organisasi Kecamatan Takeran**



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Takeran

## 1. Lurah

Lurah mempunyai tugas membantu Camat dalam :

- a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan
- b. melakukan pemberdayaan masyarakat
- c. melaksanakan pelayanan masyarakat
- d. memelihara ketentraman dan ketertiban umum
- e. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Lurah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan dan pembinaan sosial, ekonomi dan pembangunan
- b. pelaksanaan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat
- c. penyelenggaraan kegiatan kelembagaan di Kelurahan
- d. pembinaan kepegawaian di lingkungan Kelurahan
- e. perencanaan kegiatan dan anggaran kelurahan dalam rangka pelaksanaan APBD
- f. pelaksanaan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan terhadap kewenangan yang menjadi tanggung jawab kelurahan dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat

## 2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program dan anggaran kegiatan kelurahan
- b. melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan dan penyusunan laporan serta memberikan pelayan teknis dan sosial strative kepada seluruh perangkat pemerintah kelurahan
- c. mengoordinasikan tugas-tugas dari seksi-seksi kelurahan;

- d. melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha umum dan kepegawaian di lingkup kelurahan
- e. melaksanakan pengelolaan urusan administrasi keuangan dan aset/inventaris kelurahan
- f. melaksanakan pengumpulan, evaluasi data dan penyusunan program kelurahan
- g. melaksanakan pembinaan penyelenggaraan tugas umum pemerintah kelurahan, pembangunan dan pembinaan kesejahteraan rakyat.
- h. Menyediakan bahan dalam rangka rapat dinas kelurahan
- i. Melaksanakan urusan rumah tangga dan tata usaha perkantoran kelurahan dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat

### 3. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program dan anggaran Seksi pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum
- b. melaksanakan kegiatan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum Kelurahan
- c. melaksanakan administrasi kependudukan Catatan Sipil;
- d. melaksanakan kegiatan dalam rangka membantu tugas-tugas dibidang Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- e. mengoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum (PEMILU)
- f. melaksanakan fasilitasi dibidang pertanahan/keagrariaan;
- g. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang pemerintahan serta penyusunan pelaporan program kerja Seksi Pemerintahan, Ketentram dan ketertiban Umum.
- h. Melaksanakan kegiatan Perlindungan Masyarakat (LINMAS)
- i. Melaksanakan pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi negara dan kesatuan bangsa
- j. Melaksanakan kegiatan pencegahan dalam menghadapi bencana alam dan bencana lainnya serta membantu pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran bantuan ke

masayarakat serta melakukan kegiatan pengaman akibat bencana alam dan bencana lainnya

- k. Melaksanakan pembangunan dan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan kerukunan warga dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

#### 4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas :

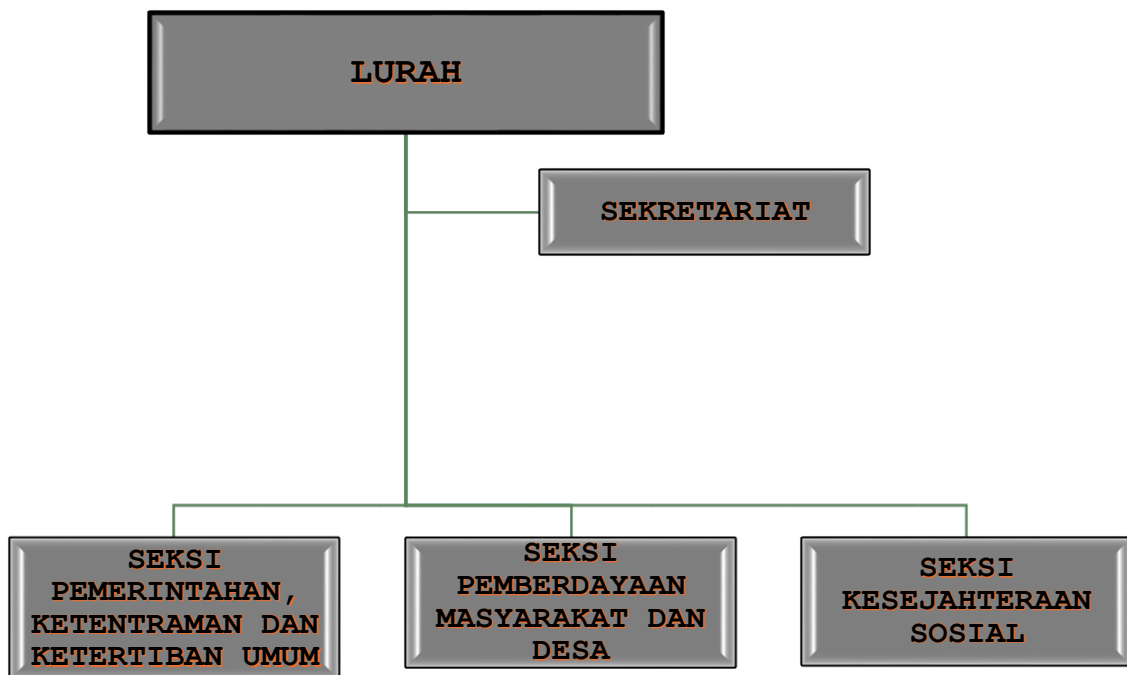
- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi pemberdayaan masyarakat
- b. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan dalam bidang perbankan dan perkreditan rakyat
- c. Melaksanakan kegiatan pembinaan perkoperasian, usaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam meningkatkan kehidupanekonomi masyarakat;
- d. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan dalam kegiatan/usaha peternakan, perikebunaan, perikanan dan pertanian
- e. Melaksanakan pembinaan administratif pembangunan di kelurahan dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka musyawarah Lembaga Kemasyarakatan
- f. Melaksanakan kegiatan pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, dan Organisasi Kemasayrakatan lainnya;
- g. Melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian.
- h. Melaksanakan penyusunan data administrasi perekonomian di kelurahan
- i. Melaksanakan dan pembinaan di bidang kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang ada di Kelurahan
- j. Melaksanakan Musrenbang di Kelurahan
- k. Melaksanakan pengumpulan, evaluasi data dan pelaporan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

## 5. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi kesejahteraan sosial
- b. Melaksanakan program dan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan
- c. Melaksanakan program dan pembinaan dalam rangka meningkatkan kegiatan dan peran serta lembaga sosial kemasyarakatan dan pelayanan sosial;
- d. melaksanakan program dan pembinaan di bidang kesehatan masyarakat dan keluarga berencana
- e. melaksanakan program dan pembinaan kegiatan pengembangan sarana dan prasarana keagamaan
- f. melaksanakan program dan kegiatan peringatan Hari Besar Nasional dan Agama;
- g. melaksanakan program dan pembinaan lembaga sosial kemasyarakatan dan pembinaan di bidang pendidikan, kebudayaan dan pariwisata
- h. melaksanakan program dan pembinaan di bidang kepemudaan dan wadah organisasi kepemudaan
- i. melaksanakan dan pembinaan di bidang olahraga dan wadah organisasi olahraga
- j. Melaksanakan program dan pembinaan kegiatan dalam rangka pengusulan dan pendistribusian bantuan sosial kepada korban bencana alam dan bencana lainnya
- k. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja Seksi Kesejahteraan Sosial dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

Adapun Struktur Organisasi Kelurahan Takeran adalah sebagaimana dalam gambar sebagai berikut :



## 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

### 1) Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan didukung Sumber Daya Manusia (ASN) dengan jumlah dan rincian sebagai berikut :

#### 1. Jumlah PNS Berdasarkan Golongan/Ruang

Tabel 2.1

Jumlah PNS Kecamatan Takeran Kab. Magetan berdasarkan Golongan/Ruang

No	Golongan/Ruang	Jumlah (orang)	Laki-laki	Perempuan
1	IV/e	0		
2	IV/d	0		
3	IV/c	0		
4	IV/b	0		
5	IV/a	2	2	
6	III/d	2	1	1
7	III/c	8	8	
8	III/b	2	1	1
9	III/a	3	3	
10	II/d	0		
11	II/c	0		
12	II/b	0		
13	II/a	0		
14	I/d	0		
15	I/c	0		

16	I/b	0		
17	I/a	0		
<b>Jumlah</b>		<b>17</b>	<b>15</b>	<b>2</b>

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Takeran Kab. Magetan

## 2. Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan/Eselon

Tabel 2.2

Jumlah ASN Kecamatan Takeran Kab. Magetan berdasarkan Jabatan/Eselon

No	Jabatan	Eselon	Jumlah (orang)
1	Camat	III.a	1
2	Sekretaris	III.b	1
3	Kepala Sub Bagian	IV.b	2
4	Kepala Seksi	IV.a	2
5	Pengelola Keuangan	-	1
6	Pengelola Administrasi Pemerintahan	-	1
7	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	-	1
8	Pengelola Umum Operasional	-	1
9	Lurah	-	1
10	Kepala Seksi	-	2
11	Pengadministrasi Pemerintahan	-	1
12	Pengadministrasi Umum	-	1
13	Pengadministrasi Perkantoran	-	2
<b>Jumlah</b>			<b>17</b>

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat Bapperida Kab. Magetan

## 3. Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 2.3

Jumlah ASN Kecamatan Takeran Kab. Magetan berdasarkan Jabatan/Eselon

No	Jabatan	Jumlah (orang)
1	Strata 2 (S2)	1
2	Strata 1 (S1)	9
3	Sarjana Muda (D3)	1
4	Diploma (D4)	0
5	SLTA	5
6	SLTP	1
7	SD	0
<b>Jumlah</b>		<b>17</b>

## 4. Jumlah PNS yang telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan

Tabel 2.4

Jumlah ASN Kecamatan Takeran Kab. Magetan berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Diklat Kepemimpinan	Jumlah (orang)
1	Diklatpim Tk. III	2
2	Adum/Adumla/Diklatpim Tk.IV	4
<b>Jumlah</b>		<b>6</b>

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat Bapperida Kab. Magetan

5. Jumlah SDM berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 2.5

Jumlah ASN Kecamatan Takeran Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Uraian	Jumlah	%
1.	Laki - laki	13	90
2.	Perempuan	4	10
Jumlah		17	100

**2) Asset/Modal**

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, aparaturnya Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan didukung oleh asset/modal sebagai berikut :

Tabel 2.5

Daftar Aset Kecamatan Takeran Kab. Magetan

No	Nama Aset	Satuan	Jumlah
1.	Bangunan Kantor	m <sup>2</sup>	824 m2
2.	Kendaraan dinas roda 4	unit	1
3.	Kendaraan roda 2	Unit	7
4.	Komputer	Unit	6
5.	Lemari Kayu	Unit	5
6.	Rak Kayu	Unit	1
7.	Pesawat Telepon	Unit	1
8.	Meja Kerja	Set	13
9.	Pesawat TV	Unit	3
10.	Printer	Unit	4
11.	Meja Komputer	Unit	3
12.	Kursi Kayu	Unit	2
13.	Kursi Besi/Metal	Unit	10
14.	Laptop	Unit	2

No	Nama Aset	Satuan	Jumlah
15.	Kursi Rapat	Unit	40
16.	Meja Pelayanan	Unit	10
17.	Kursi Tamu	Unit	2
18.	Bangku Tunggu	Unit	4
19.	Papan Pengumuman	Unit	1
20.	AC	Unit	2
21.	Kipas Angin	Unit	4
22.	LCD Projector	Unit	1
23.	Camera Digital	Unit	1
24.	Personil Computer	Unit	2
25.	Laptop	Unit	5
26.	Keyboard	Unit	2
27.	Printer	Unit	4
28.	Sound System	Unit	1
29.	Pesawat Telepon	Unit	1

*Sumber data : Buku inventaris Kecamatan Takeran Kab Magetan Th. 2025*

### **2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Kinerja pelayanan Kecamatan Takeran diukur melalui capaian indikator kinerja berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai pengampu urusan kewilayahan. Adapun kinerja pelayanan Kecamatan Takeran yang dapat disajikan adalah capaian kinerja tahun 2020-2024 sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 2.6  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Takeran Kab. Magetan Tahun 2020 – 2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya (IKU)	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	IKM Kecamatan			✓	76,50	77	77,50	81	81,5	80,2	80,3	80,4	80,5	81,5	1,6	1,4	1,3	1,9	1,9
2	Kecamatan Berpredikat Kinerja Baik			✓	-	61	65	-	-	-	79,05	79,05	-	-	-	120,60	120,60	-	-
3	Nilai Predikat Kinerja Kecamatan			✓	-	-	63	70	71	-	-	65	71	73	-	-	-	125,67	108
4	Nilai SAKIP Kecamatan			✓	-	-	-	-	80,16	-	-	-	-	85,65	-	-	-	-	100

Kecamatan Takeran menunjukkan kinerja pelayanan publik yang terus mengalami perbaikan, terutama dalam hal kecepatan, ketepatan, dan kemudahan layanan administrasi kepada masyarakat. Namun, tantangan masih ada dalam hal pemerataan kualitas layanan antar desa dan keterbatasan sumber daya. Upaya peningkatan transparansi, partisipasi masyarakat, dan inovasi pelayanan terus didorong untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih responsif dan akuntabel.

Pencapaian indikator kinerja pelayanan Kecamatan Takeran dari tahun 2020 hingga 2024, berdasarkan target renstra, realisasi capaian, dan rasio capaiannya, secara umum, sebagian besar indikator menunjukkan pencapaian yang sangat baik dengan rasio capaian 100%. Hal ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan oleh Kecamatan Takeran berhasil direalisasikan dengan efektif. Beberapa poin penting dari analisis:

1. IKM Kecamatan terus meningkat dari 80,2 (2020) menjadi 81,5 (2024), dengan capaian diatas 100% setiap tahun sejak 2020.
2. Kecamatan Berpredikat Kinerja Baik, tahun 2020 indikator ini belum ditetapkan sehingga tidak dilakukan penilaian, pada fase awal penerapan (Tahun 2021 dan tahun 2022) nilai mengalami kenaikan karena Kecamatan Takeran melaksanakan serangkaian kebijakan dan inovasi layanan yang di implementasikan secara inetsnif.
3. Nilai predikat kinerja kecamatan juga mengalami peningkatan yang signifikan, dari 65 pada tahun 2022 menjadi 71 pada tahun 2024, hal ini menunjukkan perbaikan signifikan dalam kualitas pelayanan publik.
4. Nilai SAKIP Kecamatan menunjukkan tren positif dengan capaian 100%, yang mencerminkan akuntabilitas dan efisiensi yang baik.



TABEL 2.7

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		1.809.041.228	2.483.626.165	2.543.742.822	2.484.406.105		1.510.315.540	2.099.576.622	2.454.609.120	2.306.868.565		83,48	84,53	96,49	92,85	37,2	39
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		21.132.050	23.697.050	15.189.000	25.000.000		15.189.000	22.472.800	15.175.662	14.466.150		71,87	94,83	99,91	57,86	12	47
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		19.318.700	19.870.900	943.305.700	25.000.000		19.318.450	19.697.150	924.128.533	22.841.450		96,99	99,13	97,96	91,36	2,8	1,9
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMANDAN KETERTIBAN UMUM		40.064.050	40.250.450	48.559.000	100.000.000		34.500.000	34.547.150	46.516.500	90.193.325		98,97	85,83	95,79	90,19	0,4	0,1
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		12.335.250	13.235.300	13.334.250	20.000.000		12.000.000	13.195.900	13.229.250	10.860.000		100	99,90	99,21	90,19	0,07	0,09

#### **2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan.**

Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan memiliki kelompok sasaran pelayanan antara lain seluruh penduduk yang tinggal di wilayah Desa/Kelurahan Kecamatan. Ini mencakup semua warga negara Indonesia, baik yang berdomisili tetap maupun tidak tetap, yang berada dalam batas wilayah administrasi kecamatan. Penduduk Kecamatan meliputi semua orang yang secara sah terdaftar sebagai penduduk kecamatan, termasuk anak-anak, orang dewasa, lanjut usia, dan penyandang disabilitas. Dengan demikian, pelayanan kecamatan mencakup seluruh penduduk di wilayah tersebut, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dan meningkatkan kualitas hidup.

#### **2.1.5 Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Layanan.**

Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan memiliki layanan Desa, Kelurahan dan Jasa layanan instansi vertikal perangkat daerah dalam pemberian layanan. Kecamatan Takeran memberikan pelayanan dalam mewujudkan Pembangunan di Tingkat Desa dan Kelurahan serta memiliki fungsi memberikan pelayanan pada Desa dan Kelurahan.

#### **2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah**

Dalam melaksanakan program / kegiatan Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan tidak memiliki dukungan BUMD dalam pencapaian kinerjanya

#### **2.1.7 Kerjasama Daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah**

Dalam melaksanakan Program / kegiatan Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan tidak ada kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab Kecamatan takeran

### **2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah**

#### **2.2.1. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah**

- **Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan menghadapi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelayanan publik di kecamatan
  - Keterbatasan sarana prasarana Pelayanan seperti kendaraan operasional, peralatan teknologi informasi, dan fasilitas pendukung lainnya yang mengurangi efisiensi kerja dan menghambat responsivitas pelayanan
2. Belum optimalnya koordinasi dan Fasilitasi pembangunan Desa / Kelurahan.
  - Koordinasi antara pelaku kepentingan mengenai Pembangunan di wilayah Desa/Kelurahan masih kurang terintegrasi.

### **2.2.2. Isu Strategis**

Isu strategis merupakan fenomena atau permasalahan yang belum tertangani secara optimal dalam periode lima tahun sebelumnya, serta menjadi pekerjaan rumah yang perlu ditindaklanjuti dalam Rencana Strategis (Renstra) saat ini. Selain itu, isu strategis juga lebih berorientasi pada kondisi yang berupa potensi masalah atau peluang yang perlu diantisipasi di masa depan.

Penetapan isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan didasarkan pada hasil reviu terhadap berbagai aspek strategis. Reviu singkat terhadap aspek-aspek tersebut disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.7 Perumusan Isu Strategis Kecamatan Takeran

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Belum optimalnya pelayanan publik di kecamatan	Belum optimalnya kelembagaan, birokrasi, serta transparansi informasi dan komunikasi publik		Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan	Peningkatan pemanfaatan inovasi dengan memanfaatkan teknologi informasi pelayanan publik
Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi memfokuskan pembangunan desa/kelurahan	Belum optimalnya koordinasi dan Fasilitasi pembangunan Desa / Kelurahan				Kurangnya kolaborasi antar sektor dan stakeholder	Optimalisasi kolaborasi dan koordinasi serta fasilitas terkait Pembangunan desa/kelurahan

## BAB III

### TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

Hubungan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan sebuah keterkaitan yang bersifat hirarkis dan sistematis. Visi menjadi arah utama pembangunan, misi menjadi strategi pencapaiannya, tujuan sebagai tolok ukur keberhasilan, dan sasaran menjadi target konkret yang harus dicapai. Dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang efektif, pembangunan daerah dapat berjalan sesuai dengan harapan. Pada periode RPJMD baru ini, Visi pembangunan daerah Kabupaten Magetan pada periode RPJMD 2025- 2029 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:

#### **“MAGETAN NYAMAN, MAJU, DAN BERKELANJUTAN”**

**MAGETAN NYAMAN**, mencerminkan harapan untuk menciptakan kehidupan yang aman, tenteram, dan sejahtera bagi seluruh masyarakat Kabupaten Magetan. Kata "nyaman" mencakup aspek sosial, ekonomi, lingkungan dan psikologis.

**MAGETAN MAJU**, mencerminkan tekad untuk mengantarkan Kabupaten Magetan menjadi wilayah yang berkembang pesat dalam berbagai aspek, baik ekonomi, infrastruktur, sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan hingga peningkatan kualitas hidup masyarakat.

**MAGETAN BERKELANJUTAN**, mencerminkan komitmen Kabupaten Magetan untuk melaksanakan pembangunan yang memperhatikan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Visi pembangunan daerah Kabupaten Magetan tahun 2024-2029 tersebut di atas akan dapat terwujud dengan serangkaian Misi sebagai berikut:

1. Membangun SDM yang Andal dan Berdaya Saing Kuat
2. Mengembangkan Sektor Pertanian, Mendorong Hilirisasi Produk Unggulan Berbasis UMKM, Koperasi untuk Memantapkan Perekonomian Daerah Yang Berkelanjutan
3. Pengentasan Kemiskinan melalui Pemberdayaan Masyarakat, Perlindungan Sosial dan Pembangunan Wilayah Perdesaan
4. Membangun Birokrasi Pemerintahan yang Professional, Responsive, Adaptif dan Transparan
5. Peningkatan Daya Tarik Investasi, Ekonomi Kreatif, Pariwisata, Perluasan Lapangan Kerja dan Menumbuhkan Kewirausahaan untuk Menurunkan Pengangguran
6. Membangun Infrastruktur Strategis untuk Meningkatkan Keterhubungan Antar Wilayah.
7. Membangun Kehidupan Masyarakat yang Guyup Rukun, Aman, Tenteram berasaskan Nilai Agama dan Budaya serta Menjaga Harmoni Lingkungan Hidup dan Mendorong Pengembangan Ekonomi Hijau

Dalam kerangka perencanaan strategis, Misi Politik sejumlah 7 misi sebagaimana telah dijelaskan di atas, ditransformasikan menjadi 4 tujuan guna menyederhanakan penyusunan arsitektur kinerja pembangunan. Proses transformasi ini dilakukan dengan tetap mempertahankan esensi dan makna orisinal dari masing-masing Misi Kepala Daerah. Secara lengkap diuraikan dalam tabel berikut:

VISI		MAGETAN NYAMAN, MAJU, DAN BERKELANJUTAN	
MISI	TUJUAN	SASARAN	
1. Membangun SDM yang Andal dan Berdaya Saing Kuat 7. Membangun Kehidupan Masyarakat yang Guyup Rukun, Aman, Tenteram beraskan Nilai Agama dan Budaya serta Menjaga Harmoni Lingkungan Hidup dan Mendorong Pengembangan Ekonomi Hijau	Terwujudnya SDM Unggul, Berdaya Saing dan Harmonis	1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan	
		2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	
		3. Meningkatnya Pembangunan Berwawasan Kependudukan	
		4. Meningkatnya Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Berasaskan Nilai Agama	
2. Mengembangkan Sektor Pertanian, Mendorong Hilirisasi Produk Unggulan Berbasis UMKM, Koperasi untuk Memantapkan Perekonomian Daerah Yang Berkelanjutan 5. Peningkatan Daya Tarik Investasi, Ekonomi Kreatif, Pariwisata, Perluasan Lapangan Kerja dan Menumbuhkan Kewirausahaan untuk Menurunkan Pengangguran 6. Membangun Infrastruktur Strategis untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah 7. Membangun Kehidupan Masyarakat yang Guyup Rukun, Aman, Tenteram beraskan Nilai Agama dan Budaya serta Menjaga Harmoni Lingkungan Hidup dan Mendorong Pengembangan Ekonomi Hijau	Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan	1. Meningkatnya Investasi Daerah	
		2. Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Infrastruktur Daerah	
		3. Meningkatnya Kemandirian Sektor Pertanian Berbasis Industri dan Perdagangan	
		4. Meningkatnya Kualitas Lingkungan yang Berkelanjutan	
		5. Menurunnya Angka Pengangguran melalui Perluasan Lapangan Kerja dan Menumbuhkan Kewirausahaan	
3. Pengentasan Kemiskinan melalui Pemberdayaan Masyarakat, Perlindungan Sosial dan Pembangunan Wilayah Perdesaan	Terciptanya Birokrasi Pemerintahan yang Profesional, Adaptif dan Transparan	1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	
		2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	
		3. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik	
		4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	
		5. Meningkatnya Kualitas ASN	
		6. Meningkatnya Daya Saing dan Inovasi Daerah	
4. Membangun Birokrasi Pemerintahan yang Profesional, Responsif, Adaptif dan Transparan	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	1. Meningkatnya Perlindungan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan	
		2. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Miskin dan Rentan	
		3. Mengurangi Ketimpangan Antar Wilayah	

Sesuai tugas dan fungsi pokoknya, Kecamatan Takeran mempunyai peran untuk mensukseskan tujuan ke 3 “*Terciptanya Birokrasi Pemerintahan yang Profesional, Adaptif dan Transparan*” dengan sasaran “*Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik*”.

### 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2025-2029

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2025–2029 maka disusunlah tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Takeran beserta target tahunan yang menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah ini dimaksudkan untuk mempermudah penetapan indikator kinerja dan target tahunan secara terarah dan terukur. Tujuan dan sasaran Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1  
Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET						K E T.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>NSPK :</b> Melaksanakan Kewenangan Pemerintah Daerah Urusan Kewilayahan  <b>Sasaran RPJMD :</b> Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan pemerintahan di wilayah kecamatan Takeran		Indeks Kepuasan Masyarakat    Indeks	81,5	82	82,5	83	83,5	84	I K U
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Takeran	Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan    Skor	94,28	94,50	94,70	95,00	95,50	95,60	I K U
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Takeran	Nilai SAKIP    Skor	85,65	85,70	85,75	90,00	90,25	90,50	I K U

### 3.2 Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Strategi Renstra adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah atau upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Takeran.

Penahapan pembangunan merupakan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Takeran. Penahapan Renstra Kecamatan Takeran seperti tabel di bawah ini :

Tabel 3.2  
Penahapan Strategi Kecamatan Takeran

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Digitalisasi dan Teknologi (penguatan akses internet, digitalisasi layanan pemerintahan, serta inovasi dalam administrasi publik)	Infrastruktur (pembangunan sarana prasarana publik)	Peremberdayaan Masyarakat (pelatihan keterampilan dan optimalisasi organisasi pemberdayaan masyarakat)	Pematangan Keberlanjutan sistem dan upaya transformasi digital dalam pelayanan publik maupun penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi kewilayahan sebagai dasar penyusunan arah kebijakan berikutnya	Keamanan dan Ketertiban (peningkatan koordinasi dengan aparat keamanan, program pencegahan kejahatan, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat)

### 3.3 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Arah kebijakan Kecamatan Takeran dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra disajikan dalam tabel sbb :

Tabel 3.3  
Perumusan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Melaksanakan Kewenangan Pemerintah Daerah Urusan Kewilayahan	Memfasilitasi Program Pemberdayaan Masyarakat Di setiap Lingkungan RT	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Kecamatan	
			Pemanfaatan teknologi informasi	
			Transparansi dan pelibatan publik	
			Optimalisasi partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan wilayah dan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan melalui Penguatan Mekanisme Musrenbang dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	

## **BAB IV**

### **PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

#### **4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah hasil Cascading dari Tujuan, Sasaran, Outcome dan Output**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Takeran yang telah ditetapkan maka Perangkat Daerah melaksanakan program, kegiatan dan sub-kegiatan. Program, kegiatan dan sub-kegiatan merupakan hasil *cascading* dari pohon kinerja dalam penentuan *final outcome*, *intermediate outcome*, *outcome* dan *output* dalam mencapai kinerja Kecamatan Takeran mulai tahun 2025 s.d 2030. Secara lengkap pengambilan program, kegiatan dan sub-kegiatan disajikan dalam tabel sebagaimana berikut :

Tabel 4.1 Perumusan Program, Kegiatan, Sub-Kegiatan Bapperida

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOMES</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN</b>	<b>KET</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>NSPK :</b> <b>Melaksanakan Kewenangan Pemerintah Daerah Urusan Kewilayahan</b> <b>RPJMD :</b> <b>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik</b>	<b>Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan pemerintahan di wilayah kecamatan</b>				<b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>		
		<b>Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Takeran</b>			<b>Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan</b>		

			<b>Meningkatnya kualitas Kinerja kelurahan serta kinerja pemerintahan bidang kesejahteraan sosial</b>		<b>1.Nilai Evaluasi Kinerja Kelurahan 2.Persentase efektifitas pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan bidang kesejahteraan sosial</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	
				<i>Terwujudnya kelurahan yang berdaya, sejahtera, tangguh bencana, dengan pelayanan publik yang efektif dan pembangunan partisipatif</i>	1.Jumlah lembaga pemberdayaan kelurahan yang aktif 2.Jumlah laporan IKM kelurahan Takeran 3.Jumlah usulan Musrenbang yang terfasilitasi 4.Jumlah penanganan kasus trahibum di wilayah kelurahan 5.Persentase masyarakat miskin yang terfasilitasi dalam program sosial	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
				Terlaksananya pemberdayaan di kelurahan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat	Jumlah Pokmas / Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan	

				Terlaksananya pembangunan sarana prasarana kelurahan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat	Jumlah sarana prasarana Kelurahan yang terbangun	Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan	
				Tersedianya laporan Hasil Evaluasi kelurahan	Jumlah Laporan hasil evaluasi kelurahan	Evaluasi kelurahan	
				Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi layanan sosial, pembangunan SDM, serta penanganan bencana yang efektif	Jumlah fasilitasi layanan sosial, pembangunan SDM, serta penanganan bencana	Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	
				Tersedianya laporan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat bidang kesejahteraan sosial, kepemudaan, kesehatan, keluarga berencana dan penanganan bencana	Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	

			<b>Meningkatnya Kualitas Kinerja Pemerintah Desa dan pembangunan wilayah kecamatan Takeran secara partisipatif</b>		<b>1.Persentase Desa mandiri diwilayah kecamatan 2.Persentase usulan musrenbang desa / kelurahan yang sesuai ketentuan dan diakomodir kecamatan</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	
				Terlaksananya tahapan perencanaan dan penganggaran pemerintah desa serta pembangunan wilayah yang berkualitas	1.Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran desa yang disusun tepat waktu dan sesuai kebutuhan 2.Persentase usulan musrenbang yang terfasilitasi	Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	
					Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan desa	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	
			<b>Terciptanya ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan Takeran</b>		<b>Presentase penyelesaian potensi gangguan kamtibmas di wilayah</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	

				<i>Terlaksananya koordinasi Trantibmas di tingkat Kecamatan</i>	<i>Jumlah Koordinasi trantibmas dan penegakan perda yang dilaksanakan secara efektif</i>	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
			<b>Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan lembaga masyarakat serta aparatur desa di wilayah kecamatan Takeran</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Nilai Indeks Pelayanan Publik</b></li> <li>- <b>Persentase lembaga kemasyarakatan desa / kelurahan serta aparatur pemerintah desa yang sesuai prosedur dan tertib administrasi</b></li> </ul>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	
				<i>Terlaksananya pelayanan administrasi, perpajakan, perizinan dan pembinaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan serta aparatur pemerintah desa yang efektif di kecamatan</i>	<p>1. Jumlah Koordinasi dan fasilitasi pelayanan adminduk, pajak PBB dan peijinan yang dilaksanakan secara efektif</p> <p>2. Jumlah Koordinasi dan fasilitasi pembinaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan serta aparatur pemerintah desa</p>	<i>Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan</i>	

					yang dilaksanakan secara efektif		
				Tersedianya dokumen pelayanan administrasi kependudukan, perijinan dan administrasi perangkat serta lembaga pemberdayaan desa/kelurahan yang berkualitas	Jumlah Dokumen Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	

		<b>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Takeran</b>			<b>Nilai SAKIP Kecamatan</b>		
			<b>Meningkatnya Kualitas Pelayanan pada kelurahan takeran</b>		<b>Indeks kepuasan layanan kesekretariatan pada kelurahan</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	
				Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran pendukung kinerja kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah kegiatan pemeliharaan barang milik daerah</li> <li>2. Jumlah laporan pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</li> <li>3. Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</li> <li>Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</li> <li>Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</li> </ul>	
				Terlaksannya pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan perangkat daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya</li> <li>2. Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan</li> </ul>	

					<p>3.Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi</p> <p>4.Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi,SDA dan listrik yang disediakan</p> <p>5.Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan</p> <p>6.Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan</p> <p>7.Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan</p>	<p>Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya</p> <p>Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya</p> <p>Penyediaan jasa komunikasi,SDA dan listrik</p> <p>Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor</p> <p>Penyediaan jasa pelayanan umum kantor</p> <p>Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya</p>	
				Terkelolanya barang milik daerah kelurahan	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah yang dikelola pada perangkat daerah	Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	
				Tersedianya laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	
				Tersedianya Barang dan Jasa Pendukung Kinerja Kelurahan Takeran	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	

				Terkelolanya barang yang mendukung pelaksanaan kegiatan perangkat daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya kebutuhan peralatan dan perlengkapan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				<i>Terlaksananya fasilitasi penunjang kegiatan perkantoran</i>	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

			<b>Meningkatnya kualitas pelayanan pada Kecamatan Takeran</b>		Indeks Kepuasan layanan kesekretariatan pada Kecamatan	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota</b>	
				Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan dan pelaksanaan anggaran yang sesuai perencanaan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya dokumen pengajuan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	
				Terkelolanya barang milik daerah Kecamatan Takeran	Jumlah Laporan Administrasi barang milik daerah yang dikelola pada perangkat daerah	Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	
				Tersedianya Laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	
				Terlaksananya pelayanan kepegawaian Kecamatan Takeran	Jumlah pegawai yang menerima pelayanan kepegawaian sesuai prosedur	Adminstrasi Kepagawaian perangkat daerah	

				Terlaksananya bimbingan teknis peningkatan SDM perangkat daerah	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan  Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Diklat	Penyediaan bahan logistik kantor  Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	
				Terkelolanya dokumen kepegawaian perangkat daerah	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan  Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan  Pendataan dan Pengelolaan administrasi kepegawaian	
				Tersedianya Sarana dan prasarana perkantoran pendukung kinerja Kecamatan Takeran	Jumlah Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah  Jumlah laporan pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah  Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah	
				Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang di pelihara dan dibayar pajaknya	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	
					Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantordan bangunan lainnya	

					Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	
					Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	
					Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	
					Jumlah penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Administrasi umum perangkat daerah	
				Tersedianya barang dan jasa pendukung kinerja Kecamatan Takeran			
				Terkelolanya barang yang mendukung pelaksanaan kegiatan perangkat daerah	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	
				Tersedianya kebutuhan peralatan dan perlengkapan administrasi perkantoran	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga	

					Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan		
					Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Penyediaan bahan logistik kantor	
					Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang di sediakan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	
					Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	
				Terlaksananya Fasillitasi Penunjang kegiatan perkantoran	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	
			<b>Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja pada Kecamatan Takeran</b>		Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran pada Kecamatan	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	
				Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Kecamatan Takeran	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	

				Tersusunnya Draft Analisis Data Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Draft Analisis Data Evaluasi Kinerja dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Evaluasi kinerja perangkat daerah	
				Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran yang sesuai perencanaan	Persentase Deviasi Serapan Anggaran	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Bahan Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	

#### 4.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah mengacu pada Nomenklatur

Untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk lima tahun ke depan maka ditetapkanlah pagu anggaran dan target anggaran yang nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka pendek Kecamatan Takeran

**Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan, Sub-kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Takeran Tahun 2025-2030**

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOMES/ KEGIATAN/ SUB- KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BAS E LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											Ke t
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-16	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kepuasan ASN Kecamatan Takeran terhadap layanan Kesekretariatan													
Outcome : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui birokrasi yang profesional serta pelayanan administrasi publik yang efektif dan efisien pada Kecamatan Takeran	1.Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan 2.Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran	80	80	2.365.458.589	81	2.483.731.518	82	2.607.918.094	83	2.738.313.999	84	2.875.229.698		
			90,50		91		91,50		92		92,50			

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOMES/ KEGIATAN/ SUB- KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BAS E LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											Ket
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-16	
<b>Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>  Output : Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Kecamatan Takeran	<b>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah    Dokumen</b>	8	8	8	13.500.000	8	14.175.000	8	14.883.750	8	15.627.937	8	16.409.333	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  Output : Tersusunnya Draft Analisis Data Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah    Dokumen	7	7	7	7.250.000	7	7.612.500	7	7.993,125	7	8.392.781	7	8.812.420	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  Output : Tersedianya Draft Analisis Data Evaluasi Kinerja dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah    Laporan	1	1	1	6.250.000	1	6.562.500	1	6.890.625	1	7.235.156	1	7.596.913	
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat daerah</b>	36	36	36	2.075.138.689	36	2.173.895.623	36	2.282.840.404	36	2.397.232.424	36	2.517.344.045	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOMES/ KEGIATAN/ SUB- KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BAS E LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											Ket
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-16	
<b>Output : Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan dan pelaksanaan anggaran yang sesuai perencanaan</b>	<b>Persentase Serapan Anggaran    %</b>													
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  Output : Tersedianya Dokumen Pengajuan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN    Orang/bulan	280	280	280	2.071,138.689	280	2.169.695.623	280	2.278.430.404	280	2.392.601.924	280	2.512.482.020	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD  Output : Tersedianya Bahan Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD    Laporan	18	18	18	4.000.000	18	4.200.000	18	4.410.000	18	4.630.500	18	4.862.025	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOMES/ KEGIATAN/ SUB- KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BAS E LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											Ket
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-16	
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>  <b>Output : Terkelolanya barang milik daerah pada perangkat daerah</b>	<b>Jumlah Penyediaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah   Bulan</b>					4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  Output : Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   Laporan					4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>  <b>Output Tersedianya Barang dan Jasa Pendukung Kinerja Kecamatan Parang</b>	<b>Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah    Bulan</b>	12	12	12	85.570.900	12	89.849.445	12	94.341.918	12	99.059.015	12	104.011.968	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  Output : Terkelolanya Barang yang mendukung Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan    Paket	12	12	12	4.000.000	12	4.200.000	12	4.410.000	12	4.630.500	12	4.862.025	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOMES/ KEGIATAN/ SUB- KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BAS E LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											Ket
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-16	
Perangkat Daerah														
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Ouput: Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan    Paket	12	12	12	23.368.600	12	24.537.030	12	25.763.883	12	27.052.075	12	28.404.678	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Output : Terkelolanya Barang yang mendukung Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan    Paket	12	12	12	5.000.000	12	5.250.000	12	5.512.500	12	5.788.125	12	6.077.540	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Output : Terkelolanya Barang yang mendukung Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan    Paket	12	12	12	17.042.300	12	17.894.415	12	18.789.135	12	19.728.595	12	20.715.020	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOMES/ KEGIATAN/ SUB- KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BAS E LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											Ket
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-16	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  Output : Terkelolanya Barang yang mendukung Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan    Paket	1	1	1	7.080.000	1	7.434.000	1	7.805.700	1	8.195.985	1	8.605.784	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan  Ouput: Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan    Dokumen	12	12	12	4.080.000	12	4.284.000	12	4.498.200	12	4.723.110	12	4.959.265	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  Output : Terlaksananya Fasilitasi Penunjang kegiatan Perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD    Laporan	1	1	1	25.000.000	1	26.250.000	1	27.562.500	1	28.940.625	1	30.387.656	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOMES/ KEGIATAN/ SUB- KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BAS E LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											Ket
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-16	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  Output : Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran pendukung Kinerja Kecamatan Takeran	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah    Laporan	12	12	12	91.249.000	12	95.811.450	12	100.602.022	12	105.632.123	12	110.913.728	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  Output : Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan    Laporan	12	12	12	25.000.000	12	26.250.000	12	27.562.500	12	28.940.625	12	30.387.656	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor  Output : Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan    Laporan	1	1	1	6.249.000	1	6.561.450	1	6.889.522	1	7.233.998	1	7.595.697	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOMES/ KEGIATAN/ SUB- KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BAS E LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											Ket
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-16	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  Output : Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan    Laporan	1	1	1	60.000.000	1	63.000.000	1	66.150.000	1	69.457.500	1	72.930.375	
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  Output : Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran pendukung Kinerja Kecamatan Takeran	<b>Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah    bulan</b>	12	12	12	100.000.000	12	105.000.000	12	110.250.000	12	115.762.500	12	121.550.624	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOMES/ KEGIATAN/ SUB- KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BAS E LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											Ket
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-16	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan  Output : Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya    Unit	12	12	12	50.000.000	12	52.500.000	12	55.125.000	12	57.881.250	12	60.775.312	
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  Output : Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi    Unit	1	1	1	20.000.000	1	21.000.000	1	22.050.000	1	23.152.500	1	24.310.125	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  Output : Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi    Unit	1	1	1	30.000.000	1	31.500.000	1	33.075.000	1	34.728.750	1	36.465.187	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOMES/ KEGIATAN/ SUB- KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BAS E LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											Ket
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-16	
Pendukung Kegiatan Perangkat Daerah														
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>  <b>Outcome :</b> Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan lembaga masyarakat serta aparatur desa di wilayah kecamatan	<b>Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan    %</b>  1. Nilai indeks Pelayanan Publik 2. Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan serta aparatur pemerintah desa yang sesuai prosedur dan tertib administrasi	100	2 100	2,4 100	25.000.000	2,6 100	26.250.000	2,8 100	27.562.500	3,00 100	28.940.625	3,2 100	30.387.656	
<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>  <i>Output :</i> Terlaksananya pelayanan administrasi, perpajakan,	<b>Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan    Kegiatan</b>  1. jumlah koordinasi dan fasilitasi	2	2	2	25.000.000	2	26.250.000	2	27.562.500	2	28.940.625	2	30.387.656	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOMES/ KEGIATAN/ SUB- KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BAS E LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											Ket
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-16	
perizinan, dan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan serta aparatur pemerintah desa yang efektif di kecamatan	<b>pelayanan adminduk , pajak PBB dan perizinan yang dilaksanakan secara efektif</b>    Kegiatan <b>2. jumlah koordinasi dan fasilitasi pembinaan lembaga kemasyarakatan desa / kelurahan serta aparatur pemerintah desa yang dilaksanakan secara efektif</b>    Kegiatan													
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan  Output : Tersedianya dokumen pelayanan administrasi kependudukan, perpajakan, perizinan, dan administrasi perangkat serta Lembaga Pemberdayaan Desa/ Kelurahan yang	Jumlah Dokumen Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan    Dokumen	2	2	<b>25.000.000</b>	2	<b>26.250.000</b>	2	<b>27.562.500</b>	2	<b>28.940.625</b>	2	<b>30.387.656</b>		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOMES/ KEGIATAN/ SUB- KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BAS E LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											Ket
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-16	
Berkualitas														
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>  <b>Outcome :</b> meningkatkan kualitas kinerja kelurahan serta kinerja pemerintahan bidang kesejahteraan sosial	<b>Presentase Kegiatan Pemberdayaan Desa    %</b>  <b>Persentase efektifitas Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Sosial</b>	100	100	100	25.000.000	100	26.250.000	100	27.562.500	100	28.940.625	100	30.387.656	
<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>  <i>Output :</i> Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi layanan sosial, pembangunan SDM, serta penanganan	<b>Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa    Kegiatan</b>  Jumlah fasilitasi layanan sosial,pembanguna n SDM,serta	1	1	1	25.000.000	1	26.250.000	1	27.562.500	1	28.940.625	1	30.387.656	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOMES/ KEGIATAN/ SUB- KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BAS E LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											Ket
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-16	
bencana yang efektif	penanganan bencana    kegiatan													
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan  Output : Tersedianya laporan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat bidang kesejahteraan sosial,kepemudaan,kesehatan,keluarga berencana dan penanganan bencana	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan    Laporan	1	1	1	25.000.000	1	26.250.000	1	27.562.500	1	28.940.625	1	30.387.656	
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b> Outcome : terciptanya ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan	<b>Presentase Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>    %  <b>Persentase penyelesaian potensi gangguan kamtibmas di wilayah kecamatan</b>    persen	100	100	100	100.000.000	100	105.000.000	100	110.250.000	100	115.762.500	100	121.550.625	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOMES/ KEGIATAN/ SUB- KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BAS E LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											Ket
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-16	
<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>  Output : Terlaksananya koordinasi Trantibmas di tingkat kecamatan (Forkopimca)	<b>Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum    Kegiatan</b>	2	2	2	100.000.000	2	105.000.000	2	110.250.000	2	115.762.500	2	121.550.625	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan  Output : Tersedianya Laporan koordinasi Kamtibmas , penegakan Perda dan pembinaan persatuan kesatuan bangsa di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan    Laporan	2	2	2	100.000.000	2	105.000.000	2	110.250.000	2	115.762.500	2	121.550.625	
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Presentase desa/kelurahan Dengan nilai Monev Terpadu Minimal 80    %</b>	80	80	81 100	30.000.000	82 100	31.500.000	83 100	33.075.000	84 100	34.728.750	85 100	36.465.187	



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOMES/ KEGIATAN/ SUB- KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BAS E LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											Ket
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGE T	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-16	
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa  Output : tersedianya dokumen Pemerintahan serta pembangunan desa yang berkualitas	Jumlah Dokumen Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa    Dokumen	1	1	5	30.000.000	5	31.500.000	5	33.075.000	5	34.728.750	5	36.465.187	
<b>TOTAL</b>				2.545.458.589		2.672.731.518		2.806.368.094		2.946.686.499		3.094.020.822		

KELURAHAN TAKERAN													
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>  <b>Outcome :</b> <b>Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui birokrasi yang profesional serta pelayanan administrasi publik yang efektif dan efisien pada Kelurahan Takeran</b>	<b>Kepuasan ASN terhadap Layanan Kesekretariatan   nilai</b>	80	80	80	140.140.000	81	147.147.000	82	154.504.350	83	162.229.567	84	170.341.045
	<b>Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan</b>												
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  Output : Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan dan pelaksanaan anggaran yang sesuai perencanaan	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  Persentase deviasiserapan anggaran perangkat daerah    persen	100	100	100	650.000	100	682.500	100	716.625	100	752.081	100	789.685
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD  Output : Tersedianya Bahan Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD    laporan	12	12	12	650.000	12	682.500	12	716.625	12	752.081	12	789.685

<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>  <b>Output : Tersedianya Barang dan Jasa Pendukung Kinerja Kelurahan takeran</b>	Jumlah Penyediaan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah     bulan	12	12	12	53.690.000	12	56.374.500	12	59.193.225	12	62.152.886	12	65.260.530	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  Output : Terkelolanya Barang yang mendukung Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan \\paket	1	1	1	3.000.000	1	3.150.000	1	3.307.500	1	3.472.875	1	3.646.518	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  Output : Terkelolanya Barang yang mendukung Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   paket	4	4	4	37.190.000	4	39.049.500	4	41.001.975	4	43.052.073	4	45.204.676	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  Output : Terkelolanya Barang yang mendukung Pelaksanaan Kegiatan Perangkat daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan   paket	1	1	1	1.000.000	1	1.050.000	1	1.102.500	1	1.157.625	1	1.215.506	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor  Output : Terkelolanya Barang yang mendukung Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   paket	1	1	1	5.000.000	1	5.250.000	1	5.512.500	1	5.788.125	1	6.077.531	

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  Output : Terkelolanya Barang yang mendukung Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan     paket	1	1	1	1.500.000	1	1.575.000	1	1.653.750	1	1.736.437	1	1.823.258
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  Output : Terlaksananya Fasilitas Penunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD     laporan	12	12	12	6.000.000	12	6.300.000	12	6.615.000	12	6.945.750	12	7.293.037
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> Output : Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran pendukung Kinerja Kecamatan Takeran	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12	12	12	75.300.000	12	79.065.000	12	83.018.250	12	87.169.163	12	91.527.621
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  Output : Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan     laporan	12	12	12	7.500.000	12	7.875.000	12	8.268.750	12	8.682.187	12	9.116.296

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
Output : Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan     laporan	12	12	12	67.800.000	12	71.190.000	12	74.749.500	12	78.486.975	12	82.411.324	
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>														
Output : Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran pendukung Kinerja Kecamatan Takeran	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah     bulan	12	12	12	10.500.000	12	11.025.000	12	11.576.250	12	12.155.062	12	12.155.062	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
Output : Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya     unit	12	12	12	500.000	12	525.000	12	551.250	12	578.812	12	607.752	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
Output : Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya/ /unit	12	12	12	10.000.000	12	10.500.000	12	11.025.000	12	11.576.250	12	12.155.062	

Kegiatan Perangkat Daerah														
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b> <b>Outcome : meningkatnya kualitas kinerja kelurahan serta kinerja pemerintahan bidang kesejahteraan sosial</b>	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan   Persen	100	100	100	1.004.860.000	100	1.055.103.000	100	1.107.858.150	100	1.163.251.057	100	1.221.413.609	
	Nilai Evaluasi Kinerja Kelurahan													
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan  Output : Terwujudnya kelurahan yang berdaya, sejahtera, tangguh bencana, dengan pelayanan publik yang efektif dan pembangunan partisipatif	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan masyarakat  1. Jumlah lembaga pemberdayaan Kelurahan yang aktif // unit  2. Jumlah Laporan IKM Kelurahan Takeran// Laporan  3. jumlah usulan musrenbang kel yang terfasilitasi // Usulan  4. jumlah penanganan kasus trantibum di wilayah kelurahan // Kasus  5. persentase masyarakat miskin yang terfasilitasi dalam	100		100	1.004.860.000	100	1.055.103.000	100	1.107.858.150	100	1.163.251.057	100	1.221.413.609	

	program sosial //Persen													
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
Output : Terlaksananya pembangunan sarana prasarana kelurahan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5	5	5	747.450.000	5	784.875.000	5	824.118.750	5	865.324.687	5	908.590.921	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
Output : Terlaksananya pemberdayaan di kelurahan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	5	6	257.410.000	6	270.280.500	6	283.794.525	6	297.984.251	6	312.883.463	
<b>TOTAL</b>					<b>1.145.000.000</b>		<b>1.202.250.000</b>		<b>1.262.362.500</b>		<b>1.325.480.624</b>		<b>1.391.754.654</b>	

### 4.3 Sub-kegiatan dalam rangka Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, untuk memfokuskan kegiatannya untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Kecamatan Takeran maka ditetapkan daftar sub-kegiatan yang mendukung program prioritas pembangunan daerah.

Tabel 4.3  
Daftar Sub-kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	meningkatnya kualitas kinerja kelurahan serta kinerja pemerintahan bidang kesejahteraan sosial	Kegiatan pemberdayaan kelurahan  Koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan desa	Mendukung tujuan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan sasaran Mengurangi Ketimpangan Antar Wilayah
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan lembaga masyarakat serta aparatur desa di wilayah kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	

### 4.4 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Takeran dapat ditentukan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator yang disajikan merupakan indikator yang terseleksi. Berikut IKU Kecamatan Takeran yang berlaku dari tahun 2025 sampai dengan 2030.

Tabel 4.4  
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Takeran

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indek Kepuasan Masyarakat	Indeks	81,5	82	82,5	83	83,5	84	
2	Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan	Skor	94,28	94,50	94,70	95,00	95,50	95,60	
3	Nilai SAKIP	Skor	85,65	85,70	85,75	90,00	90,25	90,50	

Tabel 4.5

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kecamatan Takeran 2025-2029

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
KECAMATAN TAKERAN KABUPATEN MAGETAN  
TAHUN 2025 – 2029**

Visi : MAGETAN NYAMAN, MAJU DAN BERKELANJUTAN

Misi : Membangun Birokrasi Pemerintahan yang Profesional, Responsive, Adaptif dan Transparan

Tugas : Melakukan Kewenangan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Oleh Bupati Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah dan Kemasyarakatan Dalam Kewilayahan Kecamatan

Fungsi : Sebagai Koordinator Penyelenggaraan Pembinaan, Penerapan, Penegakan Perundang - Undangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Serta Pelayanan Administrasi Surat Menyurat Secara Umum Kepada Masyarakat

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan pemerintahan di wilayah Kecamatan Takeran	Indeks Kepuasan Masyarakat	<p>Nilai IKM = <math>\frac{\text{Jumlah indeks per parameter}}{\text{Jumlah parameter}} \times 25</math></p> <p><b>9 parameter IKM :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persyaratan</li> <li>2. Sistem mekanisme dan prosedur</li> <li>3. Waktu penyelesaian</li> <li>4. Biaya/tarif</li> <li>5. Produk spesifikasi jenis pelayanan</li> <li>6. Kompetensi pelaksana</li> <li>7. Perilaku pelaksana</li> <li>8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan</li> <li>9. Sarana dan Prasarana</li> </ol>	Laporan SKM Kecamatan Takeran	Kecamatan Takeran

2.	Meningkatnya kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Takeran	Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan	<p>Formulasi Perhitungan Evaluasi Kinerja Kecamatan ( EKK ) yang diambil dari 7 aspek dengan bobot penilaian Meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum</li> <li>2. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan</li> <li>3. Penyelenggaraan tugas atributif</li> <li>4. Pelaksanaan tugas delegatif</li> <li>5. Inovasi / Kreatifitas Kecamatan pada segala aspek penilaian</li> <li>6. Pengelolaan anggaran Kecamatan</li> <li>7. Pelaksanaan tugas lainnya</li> </ol>	Bagian Tata Pemerintahan Setdakab	Kecamatan Takeran
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Takeran	Nilai SAKIP	<p>Nilai SAKIP</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bobot 30 komponen perencanaan</li> <li>2. Bobot 30 komponen pengukuran kinerja</li> <li>3. Bobot 15 komponen pelaporan kinerja</li> <li>4. Bobot 25 komponen evaluasi</li> </ol> <p>Komponen Perencanaan yang dinilai :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ketersediaan dokumen perencanaan daerah dan Perangkat Daerah</li> <li>b. Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)</li> <li>c. Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan</li> </ol> <p>Komponen Pengukuran yang dinilai :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengukuran kinerja telah dilakukan dan telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan</li> <li>2. Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian reward dan punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien</li> </ol> <p>Komponen Pelaporan, yang dinilai :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaporan Kinerja sesuai dengan sistematika</li> <li>2. Menyampaikan capaian IKU dengan analisa yang lengkap</li> <li>3. LkjIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan</li> <li>4. Memuat Rencana Aksi tahun berikutnya</li> </ol> <p>Komponen Evaluasi, yang dinilai :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kelengkapan dokumen SAKIP</li> <li>2. Keselarasan dokumen perencanaan</li> <li>3. Ketercapaian kinerja</li> <li>4. LHE ditindaklanjuti</li> <li>5. Menyusun rencana aksi atas tindaklanjut LHE</li> <li>6. LkjIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahun berikutnya</li> </ol>	Inspektorat	Kecamatan Takeran

**4.5 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)**

Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah ditentukan melalui IKK (Indikator Kinerja Kunci). IKK Kecamatan Takeran berlaku dari tahun 2025 sampai dengan Tahun 2030 dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4.5  
Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Takeran

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	<b>NIHIL</b>								

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Magetan berlaku selama lima tahun dari tahun 2025 hingga 2029. Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan berisi perencanaan yang merangkum visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok penerima manfaat, serta rencana pendanaan indikatif.

Rencana Strategis Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan ini diharapkan dapat memperkuat peran para pemangku kepentingan dalam menjalankan rencana kinerja, sekaligus menjadi acuan dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Perangkat Daerah. Pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029 memerlukan dukungan serta komitmen dari pimpinan dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan yang menjadi tanggung jawab institusinya.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029 diharapkan menjadi pedoman sekaligus acuan dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Kecamatan Takeran. Dokumen ini juga diharapkan mampu mengakomodasi kebutuhan pelayanan kepada masyarakat, serta berkontribusi secara optimal dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Magetan.

Magetan, 15 Desember 2025



Plt. CAMAT TAKERAN  
KABUPATEN MAGETAN

**FISCO YUDHA ARISTA, S.IP, M.M**  
Pembina (IV/a)  
NIP 198801072007011001